

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan ekonomi masih terus berlangsung di negara Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dimana pembangunan yang berhasil tercermin dari kegiatan perekonomian yang meningkatnya jumlah usaha baik dalam bidang industri ataupun jasa.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah suatu kelompok usaha yang dimana sering menggunakan sumber dayanya dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Umkm ini merupakan kelompok usaha yang memiliki keunggulan dalam sisi penyerapan tenaga kerjanya yang banyak, sehingga dapat membantu proses pemerataan yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi negara. Mengingat UMKM umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional (Widyaresti, 2012).

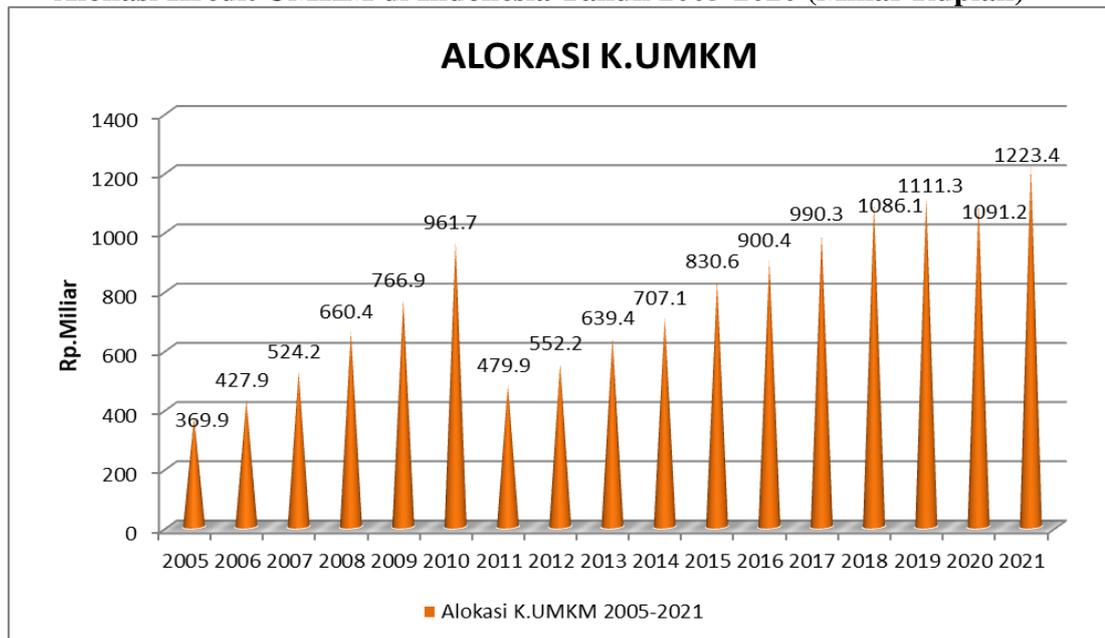
UMKM sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terbukti saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dan krisis global 2008, UMKM mampu bertahan dari krisis ekonomi tersebut, sedangkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kolaps akibat krisis. Beberapa faktor yang membuat usaha kecil menengah bertahan dari segala krisis, yaitu UMKM tidak memiliki utang luar negeri, UMKM dianggap *unbankable* sehingga tidak banyaknya utang kepada perbankan, penggunaan input lokal dan UMKM berorientasi ekspor.

Kontribusi yang diberikan oleh UMKM terhadap perekonomian nasional dinilai mampu mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97 persen dari total PDB nasional atau setara dengan Rp8.500 triliun pada tahun 2020. UMKM juga berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 97 persen dari daya serap dunia usaha di Indonesia.

Menurut Wilantra dan Susilawati dalam buku Strategi dan Pengembangan Kebijakan UMKM (2016), menjelaskan bahwa hambatan terbesar usaha di Indonesia adalah masalah korupsi yang mencapai 15.7 persen diikuti lemahnya akses pembiayaan dan inflasi. Korupsi dalam implementasinya menjadi hal yang paling menghambat UMKM dikarenakan adanya pungutan-pungutan liar yang mahal, serta rumitnya biaya perizinan usaha menyebabkan biaya ekonomi tinggi tidak dapat dihindari oleh para pelaku usaha.

Tantangan yang umumnya dihadapi oleh para pelaku usaha yang ingin meningkatkan usahanya berupa ketidakmampuan dalam aspek finansial guna meningkatkan volume usaha sehingga keterlibatan dari lembaga keuangan seperti sektor perbankan sangat diperlukan dan salah satu dari kegiatan operasional bank adalah penyaluran kredit. UMKM adalah salah satu sektor usaha yang mendukung kegiatan pembangunan negara yang membutuhkan dukungan modal dari bank untuk memperlancar kegiatan usaha serta pengembangan usaha di Indonesia. Kredit UMKM merupakan salah satu sumber pemodal bagi usaha-usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas kegiatan produksinya. Berikut data perkembangan alokasi kredit UMKM di Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2020:

Grafik 1.1
Alokasi Kredit UMKM di Indonesia Tahun 2005-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber : SEKI BI (Bank Indonesia), 2005-2020

Pada Grafik 1.1 menjelaskan perkembangan alokasi kredit UMKM dari tahun 2005 sampai dengan 2020, terlihat alokasi kredit UMKM mengalami perubahan yang cenderung naik selama 15 tahun terakhir. Walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 49,9 persen dari tahun sebelumnya, sehingga alokasi saat itu hanya Rp.479,9 triliun. Tetapi, pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan alokasi kredit UMKM yaitu sebesar Rp.552,2 triliun dan jumlah alokasi terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi Rp.1.223,4 triliun.

Secara grafik menunjukkan alokasi dana kredit UMKM cenderung naik, namun jika dilihat persentase perubahan alokasi kredit UMKM tiap tahunnya masih rendah dan mengalami penurunan, seperti persentase alokasi tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya mengalami penurunan persentase sebesar -1,84 persen dan tahun 2019 persentase perubahannya terhadap alokasi tahun sebelumnya 2018 hanya sebesar 2,32 persen, persentase ini terbilang rendah jika dibandingkan

dengan persentase perubahan tahun 2006 terhadap tahun sebelumnya yang persentase pertumbuhannya sebesar 15,68 persen.

Menurut Ida Ayu Aishwarya Rai dan Ni Ketut Purnawati (2017) menjelaskan bahwa besarnya kredit yang diberikan ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Loan* (NPL), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Tingkat Suku Bunga Kredit.

Selain itu, Besar jumlah simpanan pihak ketiga yang diperoleh bank dari masyarakat juga mampu mempengaruhi alokasi dana kredit yang akan disalurkan oleh pihak bank, termasuk alokasi dana kredit UMKM. Karena, Semakin besar dana dimiliki atau yang mampu dihimpun oleh bank, maka semakin besar juga alokasi dana kredit yang akan disalurkan kepada UMKM. Sebaliknya, jika kecil jumlah dana yang dimiliki atau dihimpun oleh bank, maka kecil juga alokasi dana kredit yang dapat disalurkan oleh bank.

Grafik 1.2
Simpanan Pihak Ketiga Perbankan Tahun 2005-2020 (Miliar Rupiah)



Sumber : SEKI BI (Bank Indonesia), 2005-2020

Pada Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan simpanan pihak ketiga yang dihimpun oleh lembaga perbankan dari masyarakat Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2020. Selama 15 tahun terakhir terlihat bahwa jumlah simpanan pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan terus mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah simpanan pihak ketiga, menunjukkan keberhasilan dari produktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pihak perbankan Indonesia.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh simpanan pihak ketiga terhadap penyaluran kredit telah dilakukan oleh sejumlah peneliti diantaranya adalah Ade Onny Siagian (2019), menjelaskan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit UMKM pada bank BUMN, hasil penelitian yang berbeda diperoleh Igarni Wau (2019) menjelaskan secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada penyaluran kredit bank umum yang tercantum di BEI.

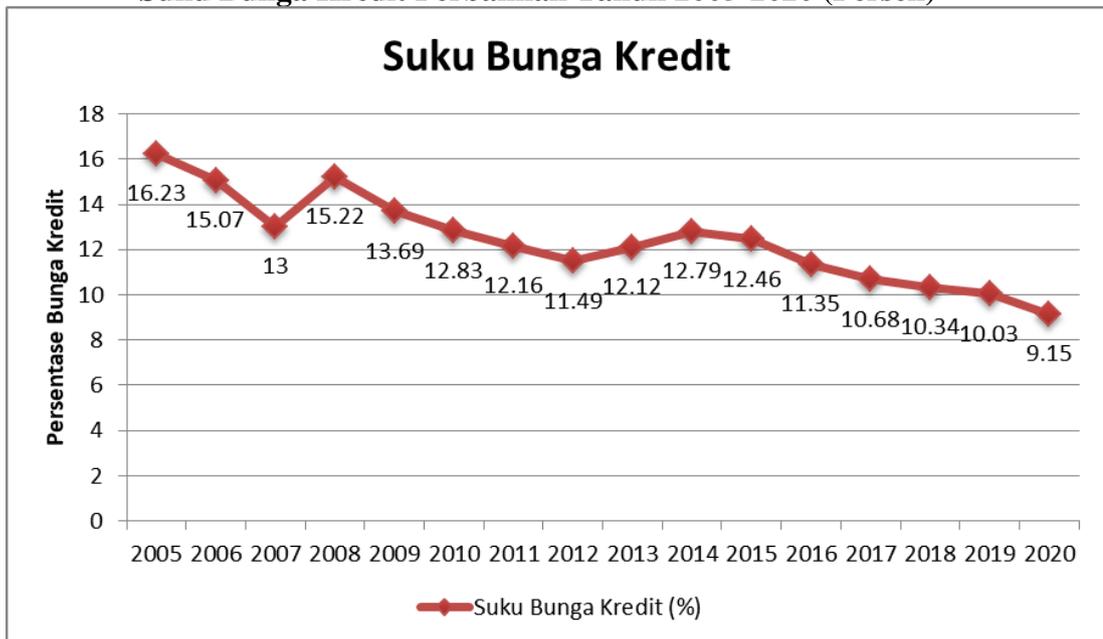
fenomena ini juga terjadi pada alokasi kredit UMKM tahun 2011 dan 2020 yang terlihat pada grafik 1.1 bahwa pada tahun tersebut terjadi penurunan alokasi kredit UMKM dari tahun sebelumnya, sedangkan simpanan pihak ketiga tahun 2011 dan 2020 masih mengalami peningkatan.

Disisi lain suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank juga berpengaruh terhadap jumlah kredit UMKM. Menurut Kasmir (2013:114) Suku bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Natalia JI (2014), menyatakan adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan dalam

perekonomian Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap nasabah-nasabah yang akan melakukan kredit. Hal ini sejalan dengan pendapat Kasmir (2002:122), yang menyatakan bahwa “semakin rendah tingkat suku bunga maka akan semakin banyak permintaan kreditnya”, dan begitu sebaliknya.

Grafik 1.3
Suku Bunga Kredit Perbankan Tahun 2005-2020 (Persen)



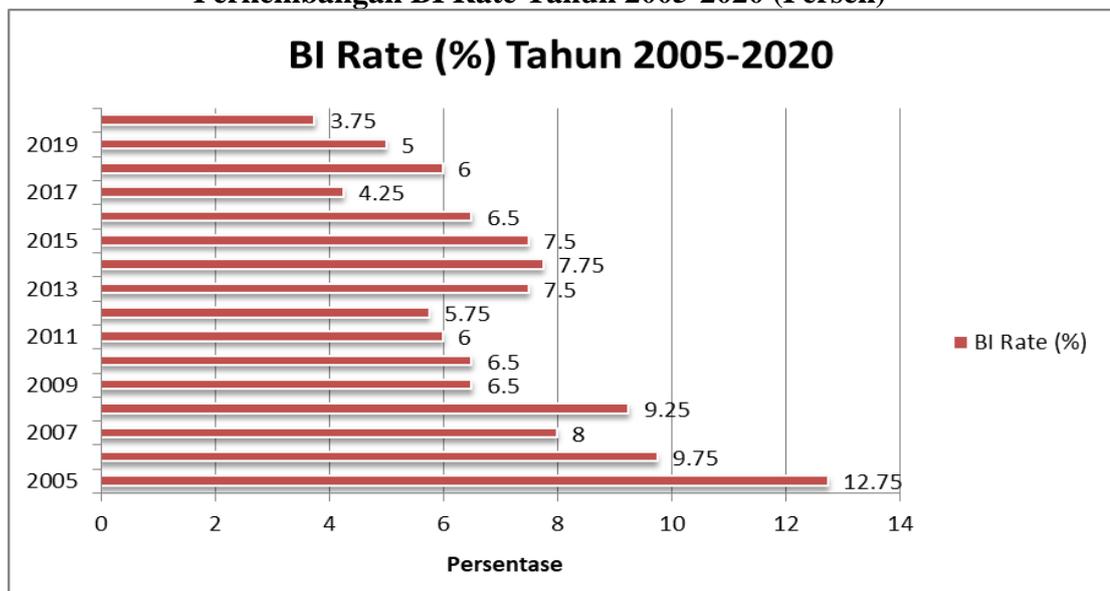
Sumber : SEKI BI (Bank Indonesia), 2005-2020

Pada Grafik 1.3 menunjukkan adanya perubahan tingkat suku bunga kredit yang cenderung menurun selama tahun 2005 sampai dengan 2020. Pada tren grafik di atas terlihat suku bunga kredit mengalami fluktuatif yang beragam. Selama rentang tahun tersebut tingkat suku bunga kredit tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 16,23 persen dan peningkatan suku bunga juga terjadi pada tahun 2008 sebesar 15,22% karena terjadi perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh resesi di Amerika Serikat. Tingkat suku bunga kredit terus berfluktuasi hingga suku bunga terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,15 %.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas pengaruh suku bunga kredit terhadap kredit perbankan telah dilakukan oleh Ake Lintang Samudra (2019) menjelaskan bahwa suku bunga kredit bank berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap total UMKM di Indonesia. Penemuan berbeda ditemukan pada penelitian Ade Onny Siagian (2019) yang menjelaskan tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit UMKM bank Umum.

Selain suku bunga kredit, jumlah kredit yang akan disalurkan oleh perbankan juga dipengaruhi oleh BI rate yaitu tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai acuan bank-bank umum dalam menentukan suku bunga kredit pada nasabahnya. Ketika BI rate diturunkan, maka suku bunga bank juga ikut menurun sehingga banyak masyarakat yang berminat melakukan pinjaman, karena harga yang akan dikembalikan kepada bank menjadi lebih rendah dari waktu sebelumnya.

Grafik 1.4
Perkembangan BI Rate Tahun 2005-2020 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia (BI), 2005-2020

Pada grafik 1.4 menjelaskan perkembangan suku bunga bank Indonesia (BI Rate) selama tahun 2005 sampai dengan 2020. Pada rentang tahun tersebut BI

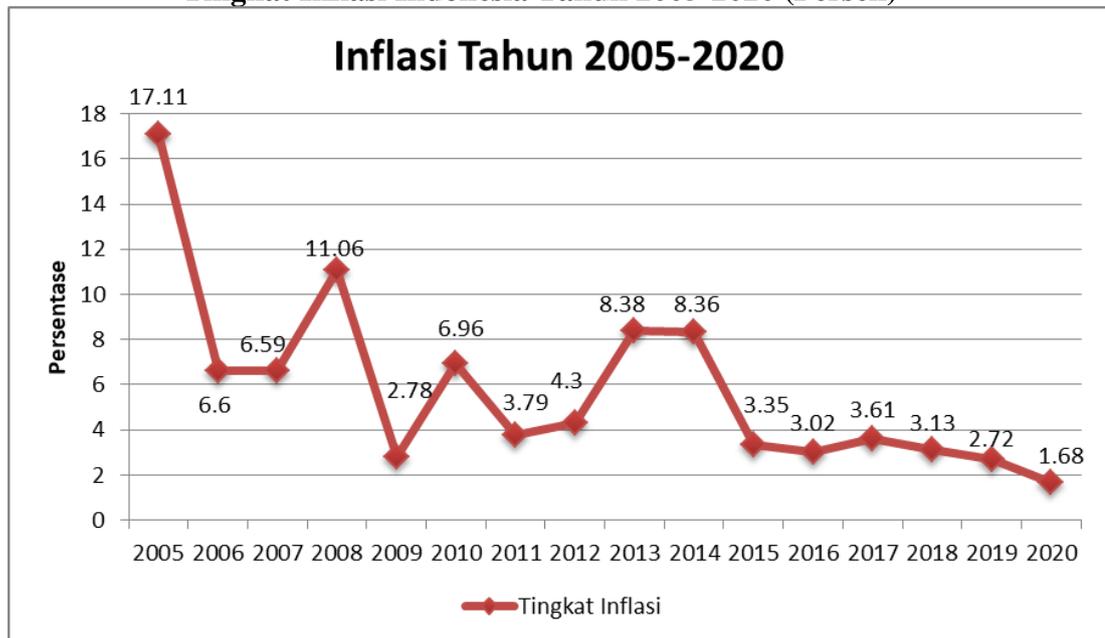
rate telah mengalami fluktuasi beragam yang cenderung menurun. BI rate tertinggi pada 15 tahun terakhir terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,75 persen dan terjadi perubahan yang beragam pada tahun berikutnya, sehingga persentase BI rate terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 3,75 persen. BI rate merupakan acuan dasar bagi perbankan dalam menentukan suku bunga kredit kepada pihak debitur, termasuk kredit UMKM.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh suku bunga bank Indonesia atau BI rate terhadap kredit bank telah dilakukan oleh Nuramalia Hasanah (2017) menemukan bahwa BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia. Penemuan berbeda ditemukan oleh Dessy Handa Sari et.al. (2021) yang menjelaskan bahwa BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM.

Disamping simpanan pihak ketiga, suku bunga kredit dan BI rate oleh perbankan alokasi kredit umkm juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia. Tingkat inflasi yang terjadi mampu mempengaruhi volume kredit yang akan disalurkan bank kepada masyarakat, karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat, sedangkan harga-harga umum barang terus menerus mengalami kenaikan saat terjadinya inflasi. Maka untuk mencukupi kebutuhan hidup, biasanya masyarakat akan melakukan pinjaman kepada perbankan. Untuk itu pentingnya pengendalian inflasi dilakukan pemerintah agar tidak berdampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Bank Indonesia (BI), berikut merupakan perkembangan inflasi yang terjadi pada Indonesia selama 15 tahun terakhir, yaitu tahun 2005 sampai dengan 2020 :

Grafik 1.5
Tingkat Inflasi Indonesia Tahun 2005-2020 (Persen)



Sumber : Bank Indonesia (BI), 2005-2020

Pada grafik 1.5 menunjukkan perkembangan inflasi dari tahun 2005 sampai dengan 2020, inflasi yang terjadi di Indonesia 15 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung menurun hingga tahun 2020. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 17,11 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006 sebesar 6,60 persen setelah itu mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 11,06 persen karena terjadinya krisis global yang juga berdampak buruk untuk perekonomian Indonesia. Perkembangan Inflasi di Indonesia mengalami perubahan yang cenderung menurun, hingga inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,68 persen.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh inflasi terhadap jumlah kredit UMKM telah dilakukan oleh Nuramalia Hasanah (2017) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM oleh bank umum di Indonesia. Namun, penemuan berbeda pada penelitian Ake Lintang Samudra (2019) menjelaskan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

total kredit UMKM karena dengan naiknya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha, serta jika inflasi meningkat maka kecenderungan masyarakat untuk menabung juga akan berkurang yang akan mengakibatkan turunya DPK dan berdampak pada turunnya kredit yang akan disalurkan perbankan.

Selain faktor simpanan pihak ketiga, suku bunga kredit, BI rate dan inflasi alokasi kredit terhadap UMKM juga dipengaruhi oleh fenomena ekonomi yang terjadi, yaitu krisis yang terjadi pada 2008 menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia secara drastis. Krisis keuangan juga mengurangi pasokan likuiditas sektor keuangan karena bangkrutnya beberapa institusi keuangan global khususnya bank-bank investasi yang berpengaruh pada aliran kas perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga dan turunnya pendanaan ke pasar modal dari perbankan global.

Sektor UMKM merupakan pilar yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena itu diperlukan adanya kemudahan dan ketersediaan kredit UMKM dari pihak perbankan dan pemerintah, karena dengan modal yang memadai, maka akan meningkatkan kuantitas dan kualitas UMKM di Indonesia.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan pemodal dan jumlah kredit UMKM pada perbankan yang peneliti uraikan diatas serta adanya perbedaan temuan pada penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kredit UMKM di Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini secara ilmiah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Simpanan Pihak ketiga, Suku bunga Kredit, BI Rate, Inflasi dan Krisis Ekonomi terhadap Alokasi Kredit UMKM di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh simpanan pihak ketiga terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga kredit terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh suku bunga BI rate terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh krisis ekonomi terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi masalahnya dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi kredit umkm di Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan 2021. Variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah simpanan pihak ketiga, suku bunga kredit, BI rate, Inflasi dan Krisis Ekonomi Sebagai variabel independen dan alokasi kredit UMKM di Indonesia merupakan variabel dependen.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh simpanan pihak ketiga terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga kredit terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga BI rate terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi terhadap alokasi kredit UMKM di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk :

1. Untuk Penulis : Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis serta syarat memperoleh gelar sarjana strata-1 ekonomi.
2. Untuk Pemerintah dan Perbankan : Sebagai informasi dan referensi dalam membuat kebijakan dimasa mendatang untuk kesejahteraan UMKM di Indonesia.
3. Untuk Masyarakat : Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan pembaca serta refensi bagi penelitian selanjutnya.